

**KOORDINASI *STAKEHOLDER* DALAM MENANGGULANGI BANJIR
BANDANG TAHUN 2023 DI KABUPATEN LAHAT**

(SKRIPSI)

Oleh:

**WIDYAWATI BAGUS PRATAMA
NPM. 1916041019**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRACT

STAKEHOLDER COORDINATION IN OVERCOMING FLASH FLOODS IN 2023 IN LAHAT REGENCY

By

WIDYAWATI BAGUS PRATAMA

Flash floods are a disaster that often occurs in Lahat Regency. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) is a government-owned agency to deal with disasters. Apart from BPBD, coordination in dealing with flash floods in Lahat Regency is carried out by the stakeholders involved based on Law no. 24 of 2007 concerning Disaster Management which provides opportunities for all interested parties (stakeholders) to participate in disaster management, including international and non-governmental institutions. Coordination is carried out because Lahat Regency is an area that is prone to flash floods so coordination is needed to deal with it. The aim of this research is to find out and identify stakeholders in dealing with flash floods in Lahat Regency. This research applies qualitative data source techniques that use primary and secondary data. Data collection techniques include documentation, observation, interviews. The technique of analyzing data is by reducing, presenting and concluding. The research was analyzed based on coordination indicators (Hasibuan, 2011), namely unity of action, communication, division of work and discipline. The findings of this research show that stakeholders in dealing with flash floods in Lahat Regency have not been optimal because these indicators have not been effective or efficient in their implementation.

Keyword : Namely unity of action, communication, division of work and discipline.

ABSTRAK

KOORDINASI *STAKEHOLDER* DALAM MENANGGULANGI BANJIR BANDANG TAHUN 2023 DI KABUPATEN LAHAT

Oleh

WIDYAWATI BAGUS PRATAMA

Banjir bandang ialah bencana yang kerap kali muncul di Kabupaten Lahat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ialah badan milik pemerintah guna menanggulangi bencana. Selain BPBD koordinasi dalam penanggulangan banjir bandang di Kabupaten Lahat dilakukan oleh stakeholder yang terlibat berdasar UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang memberi kesempatan bagi semua yang berkepentingan (*stakeholder*) guna turut serta pada penanggulangan bencana termasuknya lembaga internasional maupun non pemerintah. Koordinasi dilakukan karena Kabupaten Lahat merupakan daerah yang rawan akan banjir bandang sehingga diperlukannya koordinasi dalam menanggulangnya. Penelitian ini tujuannya guna mengetahui juga mengidentifikasi antar *stakeholder* dalam menghadapi banjir bandang di Kabupaten Lahat. Penelitian ini mengaplikasikan teknik sumber data kualitatif yang menggunakan data primer juga sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan dokumentasi, observasi, wawancara. Teknik menganalisis datanya dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menyimpulkan. Penelitian dianalisis berdasar indikator-indikator koordinasi (Hasibuan, 2011) yakni kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Temuannya penelitian ini menunjukkan *stakeholder* dalam menanggulangi banjir bandang di Kabupaten Lahat belum maksimal dikarenakan dari indikator-indikator tersebut belum efektif-efisien dalam implementasinya.

Kata Kunci: Kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, disiplin.

**KOORDINASI *STAKEHOLDER* DALAM MENANGGULANGI BANJIR
BANDANG TAHUN 2023 DI KABUPATEN LAHAT**

Oleh

WIDYAWATI BAGUS PRATAMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **KOORDINASI *STAKEHOLDER* DALAM
MENANGGULANGI BANJIR BANDANG TAHUN
2023 DI KABUPATEN LAHAT**

Nama Mahasiswa : **Widyawati Bagus Pratama**

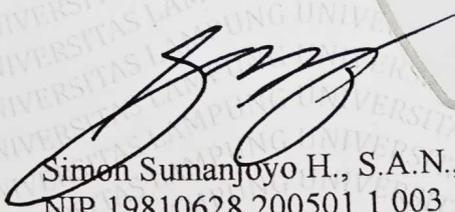
Nomor Induk Mahasiswa : 1916041019

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

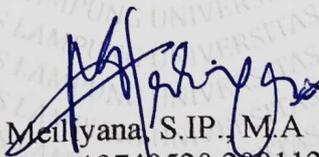
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA
NIP.19810628 200501 1 003


Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si
NIP.19910924 201903 2 019

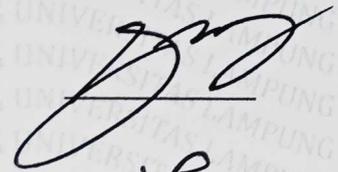
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meillyana, S.IP., M.A
NIP. 19740520 200112 2 002

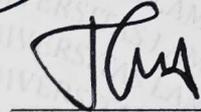
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA



Sekretaris : Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si



Penguji : Ita Prihantika, S.Sos., M.A



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian : 08 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 08 Januari 2025
Yang membuat pernyataan,



Widyawati Bagus Pratama
NPM 1916041019

RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan nama lengkap Widyawati Bagus Pratama, lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 06 Maret 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Agus Riyanto dan Ibu Widi Astuti. Penulis menempuh Sekolah Dasar di SDN 05 Pulau-Pinang tahun 2007-2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Lahat tahun 2013-2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Lahat tahun 2016-2019, dan pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung Jurusan Administasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung penulis cukup aktif dalam mengikuti organisasi tingkat Universitas maupun Jurusan yaitu UKM TAPAK SUCI UNILA dan HIMAGARA. Pada Januari 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pagardin, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Kemudian Penulis mengikuti Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB) FISIP 2022 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah , setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edward Satria)

“Dengan iman dan ahlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan ahlak saya menjadi lemah”

(Ikrar ke -6 Tapak Suci)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahiim

*Segala puji bagi Allah SWT. Dzat yang Maha Sempurna.
Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasnah Rasullullah
Muhammad SAW.*

*Dengan ketulusan hati dan rasa sayang yang tiada henti,
Ku persembahkan karyaku ini sebagai tanda cinta, kasih
Sayang, dan terima kasih kepada:*

Ayahku (Agus Riyanto) dan Ibuku (Widi Astuti) tercinta,
*Yang telah membesarkanku dan mendidik dengan penuh kasih sayang
Dengan seluruh pengorbanan yang tulus, tanpa lelah selalu mendoakan dan
Melakukan semua yang terbaik untuk keberhasilan dan kebahagiaanku*

Saudara ku tersayang

*Adik laki-lakiku (Widyansayah Bagas Kencana) yang selalu memberikan semangat
dan dukungan, serta selalu membantu menyelesaikan masalah apapun yang aku
hadapi.*

Para Pendidik yang telah mengajar dengan penuh kesabaran

*Serta Sahabat seperjuanganku yang begitu tulus menyanyangiku dengan segala
kekuranganku, selalu memberikan semangat
dan dukungan yang tulus untukku*

Almamater Universitas Lampung tercinta

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Koordinasi *Stakeholder* dalam Menanggulangi Banjir Bandang Tahun 2023 di Kabupaten Lahat”** sebagai salah satu syarat unruk memperoleh gelar sarjana administasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas kepada :

1. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A, selaku Dosen pembimbing utama penulis dalam menyusun skripsi dan Dosen pembimbing akademik. Terima kasih untuk seluruh saran dan ilmu yang Bapak berikan kepada penulis. Terima kasih untuk selalu mengingatkan dalam setiap proses penulisan skripsi. Terima kasih juga karena Bapak selalu sabar ketika memberikan arahan dan bersedia untuk membimbing penulis sampai akhir. Semoga kebahagiaan dan kesehatan s melimpah Bapak Simon
2. Ibu Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si, selaku Dosen pembimbing pendamping penulis dalam menyusun skripsi. Terima kasih untuk seluruh saran dan masukan yang Ibu berikan kepada penulis. Terima kasih juga karena Ibu selalu sabar dan meluangkan waktu ketika mengarahkan penulis mengenai penelitian yang peneliti lakukan. Semoga Ibu Vina selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan.

3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Dosen penguji skripsi penulis terima kasih untuk seluruh saran dan masukan yang Ibu berikan kepada penulis sejak seminar proposal hingga skripsi ini selesai, terima kasih untuk seluruh ilmu yang sudah Ibu berikan kepada saya. Semoga Ibu Ita selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan.
4. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas ilmu dan nasihat selama proses perkuliahan
7. Mba Wulan dan Mba Uki selaku Staff Jurusan Ilmu Administrasi Neagara , terimakasih telah membantu da memberikan pelayanan administrasi kepada penulis dengan baik dan penuh kesabaran selama perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi.
8. Terimakasih kepada Bapak Peri ST.MT, Bapak Erwan Ekajaya, ST.,MT, Bapak Dian Zulkifli, S.E, Bapak Saipul Antoni, S.E, Bapak Hendra Kurniawan, S.E, Bapak Widi Apriansi, S.E.,MM, Ibu Deby Anggraeny, S.T., MT, Ibu Henny Tariza, S.Kep.Ners, Kak Reza dan Merisa yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di Instansi. Semoga diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah swt.
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Agus Ryanto dan Ibu Widi Astuti, terima kasih atas doa-doa yang tak pernah putus yang selalu mengiringi perjalanan prosesku selama ini, terimakasih atas rasa cinta kasih sayangnya, didikannya, bombingannya, terima kasih atas pengorbanan dan perjuangannya. Semoga Bapakn dan Ibu selalu dilindungi Allah SWT diberikan kesehatan serta keberkahan umurnya. Insya Allah kelak penulis bisa membanggakan Bapak dan Ibu.
10. Teruntuk Adikku Widyansyah Bagas Kencana terima kasih telah memberikan semangat , dukungan, nasihat dan do'anya selama proses perjalananku. Semoga kita selalu membahagiakan Bapak dan Ibu

11. Terimakasih untuk Mba Vey dan Kak Asri yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik moril maupun materil.
12. Sahabatku, Melica Vinantri, Yolanda Saputri, Septi Rana Junita, Dona, dan Nadia terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu menyemangati dan menasehati.
13. Terima kasih kepada keluarga besar UKM Tapak Suci Unila yang telah memberikan banyak pengalaman serta pembelajaran selama ini.
14. Terima kasih untuk Desi, Leony, Safira, Syaefi, Yuniar Mba Sasa, Mba Rizky, Kak Farhan, Mba Vivi, Ghofi, Galih, Desti, Aji, Iyo dan lain-lain telah kebersamai saya di UKM dan perkuliahan dari awal Maba
15. Terima kasih kepada Septya, Siti Darina, Junia Simbolon, katarina Esti, dan Veronika atas saran dan waktunya dalam menemani penulis dari mahasiswa baru sampai dengan kelulusan ini. Semoga kalian dimudahkan dalam menggapai cita-cita.
16. Teman-teman GRANADA 2019. Terimakasih atas semangat yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi .

Akhir kata penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran agar karya tulis selanjutnya dapat lebih baik lagi. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca.

Bandar Lampung, 08 Januari 2025

Penulis

Widyawati Bagus Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Tentang Koordinasi	11
2.2.1 Pengertian Koordinasi	11
2.2.2 Indikator Koordinasi.....	13
2.2.3. Teknik Koordinasi	17
2.2.4. Ciri-ciri Koordinasi.....	18
2.2.5 Jenis koordinasi	19
2.2.6 Syarat-syarat koordinasi	20
2.3 Tinjauan <i>Stakeholder</i>	23
2.3.1. Pengertian <i>Stakeholder</i>	23
2.4 Penanggulangan Bencana	24
2.4 Banjir	28
2.5 Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN	32
3.1. Fokus Penelitian.....	32
3.2 Lokasi Penelitian.....	33
3.3 Tipe Penelitian	34
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	34

3.5 Tehnik Analisis Data	38
3.6 Teknik Keabsahan Data	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lahat	42
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Lahat.....	42
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Lahat	43
4.2 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	44
4.2.1 Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat.....	44
4.2.2 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat.....	44
4.2.3 Strukur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat.....	46
4.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	48
4.3 Hasil Penelitian	49
4.3.1 Kesatuan Tindakan	54
4.3.2 Komunikasi.....	66
4.3.3 Pembagian Kerja.....	73
4.3.4 Disiplin	84
4.4 Pembahasan	90
4.4.1 Koordinasi <i>stakeholder</i> dalam Menanggulangi banjir di Kabupaten Lahat.....	90
V. PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
Tabel 1.1 Banjir Bandang di Kabupaten Lahat 2020-2023.....	3
Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Dampak kejadian Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Lahat 2023.....	4
Tabel 3.1 Informan	36
Tabel 4.1 Matriks Peran Aktor Dalam Menanggulangi Banjir Bandang di Kabupaten Lahat Pada Saat Pra Bencana- Pasca Bencana.....	51
Tabel 4.2 Matriks Indikator Kesatuan Tindakan.....	64
Tabel 4.3 Matriks Indikator Komunikasi	72
Tabel 4.4 Matriks Pembagian Kerja.....	76
Tabel 4.5 Matriks Indikator Disiplin.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	30
Gambar 3.1. Analisis Data Model Miles dan Huberman.....	38
Gambar 4.1. Strukur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat.....	46
Gambar 4.2 Apel siaga.....	56
Gambar 4.3 Dinas sosial mengikuti apel siaga	56
Gambar 4.4. Rapat koordinasi penanggulangan bencana banjir 2023.....	56
Gambar 4.5. Dapur umum dan pemberian bantuan	58
Gambar 4.6. Bantuan kesehatan kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Lahat	59
Gambar 4.7. Bantuan linmas banjir bandang di Kabupaten Lahat	60
Gambar 4.8. Reaksi cepat kodim 0405/Lahat	62
Gambar 4.9. Sosial media BPBD.....	65
Gambar 4.10. Sosialisasi desa tangguh bencana banjir bandang.....	67
Gambar 4.11. Pamflet penggalangan dana banjir bandang desa lubuk Sepang.....	69
Gambar 4.12. Tim TRC menurunkan perahu karet untuk mengevakuasi.....	72
Gambar 4.13. Pemberian bantuan bank BRI.....	77
Gambar 4.14. Penggerahan alat berat	90

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan suatu fenomena yang banyak ditemukan di Indonesia. Sebagai negara tropis yang terletak di daerah rawan bencana, di tengah berlimpahnya kekayaan alam yang telah diberikan oleh Tuhan, masyarakat Indonesia tampaknya terbiasa dengan bencana alam. Bencana alam merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri dan dihilangkan. Namun gejalanya dapat dikenali dan langkah antisipasi dapat dilakukan sebagai bentuk upaya preventif (Warsono & Buchari, 2013).

Bencana banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan hilangnya nyawa serta harta benda. Kerugian akibat banjir berupa kerusakan pada bangunan, hilangnya barang-barang berharga, hingga kerugian yang mengakibatkan tidak dapat pergi bekerja dan sekolah. Banjir tidak dapat dicegah tetapi bisa dikontrol dan dikurangi dampak kerugian yang ditimbulkannya. Banjir bandang merupakan banjir yang sifatnya cepat dan pada umumnya membawa material tanah (lumpur) batu dan kayu. Akibat kecepatan aliran banyak yang disertai dengan material tersebut, maka biasanya banjir bandang ini sifatnya sangat merusak dan menimbulkan korban jiwa pada daerah yang dilalui disebabkan tidak sempatnya dilakukan evakuasi pada saat kejadian, dan kerusakan pada bangunan terjadi karena gempuran banjir yang membawa material (Seno, 2013).

Banjir bandang merupakan bencana alam yang hampir setiap tahun melanda beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lahat. Terdapat beberapa kecamatan yang sering mengalami banjir bandang. Banyaknya jumlah kejadian bencana alam di Indonesia menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar terhadap negara dan masyarakat di dalamnya. Banjir bisa memberikan dampak buruk terhadap kehidupan bermasyarakat, misalnya kesulitan mendapatkan air bersih, kerugian ekonomi, aktivitas masyarakat terhenti, timbulnya wabah-wabah penyakit hingga dapat memakan korban. Hal ini memberikan pembelajaran untuk merubah pola pikir pemerintah dan masyarakat akan pentingnya menanggulangi bencana sebelum bencana itu terjadi atau disebut dengan pengurangan resiko bencana. Pemerintah selaku pihak yang memiliki wewenang serta tujuan untuk melindungi masyarakat dari bencana haruslah membuat langkah pencegahan dan penanganan yang tepat agar bencana yang terjadi dapat diatasi, dengan membuat lembaga atau organisasi yang diberikan wewenang lebih oleh pemerintahan dalam upaya mengatasi bencana dengan lebih spesifik.

Di Indonesia badan yang bertugas dalam penanggulangan bencana yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Fungsi utamanya yaitu, perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak tepat serta efektif dan efisien. Di bawah BNPB, dibentuk Badan Penanggulangan Badan Daerah (BPBD) berdasarkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 yaitu tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang memberikan kesempatan untuk berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana termasuk lembaga internasional dan non pemerintah maka diharapkan

penanggulangan bencana terjadi di daerah akan lebih efektif dan efisien. Para pemangku kepentingan disebut institusi manapun memiliki pengaruh penting bagi keberlangsungannya institusi ataupun lembaga. Menurut Munawaroh (2016) pemangku kepentingan sering disebut dengan *stakeholder*. *Stakeholder* adalah orang-orang atau sekelompok yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal serta memiliki kepentingan dan kemampuan untuk mempengaruhi hasil.

Kota Lahat adalah Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat memiliki 24 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 360 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 427.320 jiwa dengan luas wilayah 5.31174 km dan sebaran penduduk 80 jiwa/km. Hampir setiap tahun Kabupaten Lahat mengalami bencana banjir bandang dikarenakan curah hujan yang tinggi dan kurangnya resapan air sehingga meluapnya aliran sungai. Berikut ini tabel kejadian banjir bandang di Kabupaten Lahat dari 2020-2023.

Tabel 1.1 Kejadian Banjir Bandang di Kabupaten Lahat 2020-2023

Tahun	Luas Wilayah	Korban Terdampak
2020	4 Kecamatan	0 korban jiwa
2021	1 Kecamatan	0 korban jiwa
2023	13 Kecamatan	3202 korban jiwa

sumber: pusatkrisis.kemendes.go.id (2020,2021,2023)

Berdasarkan pusat krisis Kementerian Kesehatan menjelaskan terjadi bencana banjir bandang di empat Kecamatan yaitu Pulau-Pinang, Kikim Timur, Pseksu dan Gumay Talang pada Januari 2020 yang diakibatkan dua sungai meluap di empat Kecamatan Kabupaten Lahat. Diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait korban diinformasikan tidak ada korban jiwa. Pada tahun 2021 bencana banjir bandang terjadi lagi di Kabupaten Lahat yaitu pada Kecamatan Gumay Talang, hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup lama mengakibatkan banjir bandang di Desa Sukarami, Kecamatan Gumay

Talang. Akibat dari kejadian ini enam rumah terendam. Diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait tidak ada korban jiwa.

Pada awal tahun 2023 tepatnya pada bulan Maret curah hujan di Kabupaten Lahat tinggi sehingga menyebabkan air bah tiba-tiba menghantam daerah pinggiran Sungai Lematang, rumah penduduk, sawah, ternak hanyut diterjang derasnya air yang mengalir. Hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari juga menyebabkan Sungai Itam dan Sungai Lintang meluap sehingga terjadi banjir bandang di 13 Kecamatan yaitu Lahat, Lahat Selatan, Pulau-Pinang, Tanjung Tebat, Mulak Ulu, Mulak Sebingkai, Jarai, Pseksu, Kikim Selatan, Kikim Barat, Kikim Timur, Merapi Barat dan Merapi Timur. Berikut ini rekapitulasi data dampak kejadian bencana banjir bandang di wilayah Kabupaten Lahat.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Kejadian Banjir Bandang di Kabupaten Lahat Maret 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Korban Menderita / Dampak		
			KK	Jiwa	Mengungsi
1	Lahat	3	544	-	1
2	Lahat Selatan	4	12	-	5
3	Pulau-Pinang	6	107	-	5
4	Tanjung Tebat	3	3	-	-
5	Mulak Ulu	12	13	-	-
6	Jarai	4	376	-	-
7	Pseksu	5	12	-	-
8	Kikim Selatan	12	668	-	1
9	Merapi Timur	7	811	-	-
10	Merapi Barat	7	531	1	-
11	Mulak Sebingkai	1	66	-	37
12	Kikim Barat	2	185	-	-
13	Kikim Timur	8	250	-	-
Total		74	3202	1	49

Sumber: BPBD Kabupaten Lahat 2023

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Lahat bahwa terdapat 13 Kecamatan dan 74 Kelurahan atau Desa berdampak banjir bandang yang

mengakibatkan 3202 ribu KK, 1 korban jiwa meninggal, dan 49 KK mengungsi. Penyebab banjir dikarenakan meluapnya air Sungai Lematang setelah diguyur hujan selama dua hari. Selain menggenangi beberapa lokasi, banjir juga mengakibatkan beberapa rumah warga rusak, jalan lintas Sumatera tujuan Lubuk Linggau terputus dan Desa Jati tertutup material longsor. Upaya yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Sumatera Selatan melakukan koordinasi dengan BPBD Kota Lahat dan pihak terkait, melakukan kaji cepat, memberikan pelayanan kesehatan oleh Tim UPTB *trauma center* dan pelayanan kesehatan BPBD Sumsel, serta menyerahkan bantuan paket sembako kepada korban bencana banjir bandang.

Adapun aliran listrik PLN terputus, dan akses salah satu akses menuju Desa yang terendam terputus. BPBD Kabupaten Lahat memiliki tiga bidang yaitu: Kesiapsiagaan dan Pencegahan; Tanggap Darurat dan Logistik; dan Rehabilitas dan Kontruksi. Dalam upaya tanggap darurat, tim reaksi cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat telah terjun ke lokasi kejadian bencana untuk melakukan *assesment* dan melakukan pembersihan puing bersama unsur TNI dan Polri serta bantuan masyarakat tim reaksi cepat terus melakukan pendataan dan evakuasi warga. Untuk kebutuhan mendesak saat ini diperlukan perahu karet untuk evakuasi. Ketika kondisi hujan sudah mulai redah dan air berangsur surut, BPBD masih terus melakukan pembersihan material longsor dengan penyemprotan dan sementara untuk arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif. BPBD Provinsi Sumatera Selatan juga telah mendistribusikan 200 paket logistik untuk para warga terdampak dalam upaya penanganan darurat koordinasi dengan BPBD Kabupaten Lahat. Adapun BPBD telah menyiapkan satu posko utama untuk pendistribusian bantuan bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat. Masyarakat yang terkena bencana banjir bandang lebih memilih untuk tinggal bersama keluarga yang tidak terkena bencana. Koordinasi BPBD sangat penting untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana berjalan dengan lancar.

Dari hasil observasi di beberapa kecamatan di Kabupaten Lahat masih

terdapat keluhan dari masyarakat, salah satunya yang terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai ada satu jembatan terputus, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk melewati sungai. Banjir bandang di Kabupaten Lahat ini masih termasuk skala kecil sehingga BPBD hanya melakukan penanggulangan sementara yaitu dalam waktu 14 hari. Adapun beberapa posko yang ada yaitu, posko kesehatan, dapur umum dan posko pendistribusian bantuan, tetapi tidak ada posko pengungsian. Maka sangat diperlukannya koordinasi dari *stakeholder* selaku instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana banjir bandang, dapat memberikan respon yang baik bagi masyarakat yang terkena dampak banjir bandang, sehingga masalah dalam upaya penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat perlahan-lahan dapat diatasi dengan baik dan efektif. Koordinasi ini melibatkan berbagai lembaga dan pihak terkait, baik di tingkat daerah, provinsi hingga nasional.

Hasibuan (2013) dalam (Elsera, 2023) menyatakan bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi yang lebih mengarah pada suatu proses penyatuan sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Menurut Hasibuan (2011) indikator yang mempengaruhi keberhasilan koordinasi yaitu : (1) kesatuan tindakan, (2) komunikasi, (3) pembagian kerja dan (4) disiplin.

Sedangkan Ndaraha (2015) memandang koordinasi melalui proses manajemen, yang perlu diukur adalah: (1) Informasi, komunikasi dan teknologi informasi, (2) kesadaran pentingnya koordinasi; koordinasi *built-in* di dalam setiap job atau *task*, (3) kompetensi partisipan, kalender pemerintah (4) kesepakatan dan komitmen, (5) penempatan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkooordinasi, (6) intensif koordinasi, dan (7) *feedback*.

Bencana banjir memiliki permasalahan kompleks dan multidimensi, sehingga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Adapun *stakeholder* yang terlibat dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Lahat yaitu institusi pemerintahan, swasta dan masyarakat. Dari sektor swasta juga dapat mendukung upaya pengendalian banjir bandang dengan menyediakan sumber daya keuangan dan membantu proses rehabilitasi serta rekonstruksi daerah yang terkena bencana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai koordinasi *stakeholder* dalam upaya menanggulangi banjir bandang di Kabupaten Lahat. Peneliti juga tertarik untuk mengidentifikasi permasalahan lebih lanjut. Peneliti melakukan penelitian yang berjudul **koordinasi *stakeholder* dalam menanggulangi banjir bandang tahun 2023 di Kabupaten Lahat.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana koordinasi *stakeholder* dalam menanggulangi bencana banjir bandang tahun 2023 di Kabupaten Lahat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui koordinasi *stakeholder* dalam menanggulangi banjir bandang tahun 2023 di Kabupaten Lahat.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan/masukan/informasi bagi instansi yang bersangkutan dalam hal pelaksanaan penanggulangan bencana banjir sehingga dalam pengimplementasiannya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan juga bencana banjir di Kabupaten Lahat mendapat penanggulangan yang cepat dan tepat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai pola dasar pendukung dan pembanding hasil-hasil penelitian untuk langkah selanjutnya. Terdapat beberapa bahan acuan yang menjadi sumber informasi peneliti dalam mengkaji masalah yang diteliti. Sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ariyanto, 2018) berjudul *“Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas BPBD dan hambatan-hambatan, dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam koordinasi kelembagaan guna meningkatkan BPBD. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD dengan dinas/instansi lainnya (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan), sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Begitu pula hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian indikator dari koordinasi telah dilaksanakan dengan baik, namun sebagian lagi masih

kurang bahkan ada yang belum dilaksanakan seperti pembinaan, konsultasi dan pengarahan melalui pertemuan resmi dan rutin.

Adapun, penelitian dari (Monica et al., 2022) dengan judul “*Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam Upaya Penanggulangan Pasca Bencana Banjir di Kota Medan*”. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan teori koordinasi oleh Hasibuan (2011) yang mengartikan koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu terlaksana dengan keselarasan yang mestinya. Kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian tugas dan disiplin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi BPBD dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan pasca bencana banjir di Kota Medan belum maksimal.

Selanjutnya, penelitian dari (Ramadani, 2015) dengan judul “*Koordinasi Oleh BPBD dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Bandung*”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan mengapa koordinasi oleh BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung belum berjalan seperti yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran koordinator belum berjalan dengan baik, masih adanya ketidaksamaan persepsi mengenai paradigma penanggulangan bencana yang ada saat ini. Teori koordinasi yang digunakan pada penelitian ini adalah James A.F Store dengan dimensi hierarki manajemen, peraturan dan prosedur, serta perencanaan dan penyusunan tujuan yang sesuai koordinasi eksternal pemerintah pada penanggulangan bencana banjir yang didalamnya terdapat kesatuan komando, kesamaan persepsi tentang tujuan serta pemahaman atas peraturan yang ada.

Selanjutnya, penelitian dari (Septi et al., 2022) dengan judul “*Koordinasi*

Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Tangerang Selatan". Penelitian ini menggunakan teori Hasibuan mengenai koordinasi dengan empat indikator: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa kesatuan tindakan menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola masalah sampah di jaringan *drainase* dan sungai. Pada pola komunikasi yang dilakukan lintas organisasi perangkat daerah sudah berjalan baik dengan melakukan komunikasi yang intens. Pada pembagian tugas menunjukkan bahwa kesadaran organisasi perangkat daerah terhadap pekerjaannya belum berjalan dengan baik terbukti bahwa BPBD sebagai koordinator belum mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai daerah tanggap bencana dan Dinas Pekerjaan Umum yang tidak melakukan perawatan rutin jaringan *drainase*. Pada tingkat disiplin yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah sudah berjalan baik.

2.2 Tinjauan Tentang Koordinasi

2.2.1 Pengertian Koordinasi

Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen yang tidak bisa terpisah dari fungsi manajemen lainnya karena fungsi koordinasi adalah fungsi yang menghubungkan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Asmu (2018) koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengopersikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Koordinasi berarti mengikat, mempersatukan dan menyelaraskan semua

aktivitas dan usaha. Budi Susilo dalam (Sugihartatmo,2015) telah merangkum berbagai definisi mengenai koordinasi sebagai berikut:

1. G.R Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sikron dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.
2. E.F.L Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan tersebut terlaksana dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.
3. Mc.Farland, koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan tersebut.
4. Wawaluddin Djamin, koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga saling mengisi, membantu dan melengkapi.
5. Hasibuan Malayu, koordinasi adalah suatu kegiatan mengarahakan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.
6. Handoko, koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan kegiatan- kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidnag fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut beberapa pendapat tersebut pada dasarnya koordinasi merupakan suatu “peraturan/penataan” beragam elemen kedalam suatu pengoperasian yang terpadu dan harmonis. Motivasi utama dari koordinasi biasanya adalah menghindari kesenjangan dan tumpang tindih berkaitan dengan

tugas atau kerja para pihak. Para pihak biasanya berkoordinasi dengan harapan memperoleh hasil secara efisien. Koordinasi dilakukan umumnya dengan melakukan harmonisasi tugas, peran, dan jadwal dalam lingkungan dan sistem yang sederhana. Menurut Ndraha (2015) koordinasi diartikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan dan unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan.

2.2.2 Indikator Koordinasi

Koordinasi tidak hanya dalam lingkup satu negara tetap juga lintas negara sebagaimana telah banyak dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan multi nasional. Dapat dibayangkan betapa sulitnya proses manajemen sumber daya yang tersebar diberbagai negara tanpa adanya koordinasi. Tanpa koordinasi maka sumber daya yang tersebar tersebut tidak dapat dikelola secara efektif dan efisien. Prinsip koordinasi juga harus terefleksikan dalam organisasi publik/pemerintahan maupun organisasi swadaya masyarakat. Dalam organisasi publik sumber daya yang digunakan tidak sedikit. Koordinasi merupakan salah satu alat utama bagi organisasi untuk mempercepat proses pencapaian tujuan. Koordinasi diperlukan pada semua tingkat kegiatan organisasi baik pada tingkat perumusan kebijaksanaan maupun pada tingkat pelaksanaan sejak awal dimasukkan ke dalam rencana atau program yang disusun. Hasibuan (2011) berpendapat bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi koordinasi adalah sebagai berikut :

a. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-

sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Kesatuan dari pada usaha berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikasi dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Dari pengertian komunikasi tersebut, bahwa komunikasi mengandung arti komunikais yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara azas-azas dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut.

1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan
2. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan

3. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

Maka dari itu komunikasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat, pesan atau ide, yang disampaikan kepada orang tersebut.

c. Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih yang bekerja bersama secara kooperatif dan terorganisasi dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya prinsip pembagian kerja (*division of labor*).

Prinsip pembagian kerja ini maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorang pun secara fisik mampu melaksanakan sekumpulan aktivitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorang pun yang memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu, perlu diadakan pemilihan bagian-bagian tugas dan membagi-baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

d. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan yang diharapkan. Disiplin adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku (Audina et al., 2019). Jadi disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

Sedangkan menurut Ndraha (2015), koordinasi dapat diukur melalui indikator:

- a. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi
- b. Kesadaran pentingnya koordinasi; berkoordinasi *built-in* di dalam setiap *job* atau *task*
- c. Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan. Peserta forum koordinasi harus pejabat yang berkompeten mengambil keputusan. Untuk menjamin kehadiran pejabat yang sedemikian, harus ditetapkan kalender pemerintahan (koordinasi) yang ditaati sepenuhnya dari atas ke bawah
- d. Kesepakatan dan komitmen. Kesepakatan dan komitmen harus diagendakan (diprogramkan) oleh setiap pihak yang berkoordinasi.
- e. Penepatan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi.
- f. Insentif koordinasi, yaitu sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak menaati kesepakatan bersama. Sanksi itu datang dari pihak atasan yang terkait.
- g. *Feedback* sebagai masukan balik ke dalam proses koordinasi selanjutnya.

2.2.3. Teknik Koordinasi

Mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam organisasi diperlukan teknik- teknik tertentu. Pemahaman terhadap teknik-teknik koordinasi sangat diperlukan oleh para koordinator atau manager karena dengan mengetahui teknik-teknik koordinasi kemungkinan besar akan dapat dicapai hasil yang optimal, efisien, dan efektif. Teknik-teknik koordinasi menurut Handyaningrat (1986) antara lain:

- a. Koordinasi melalui kewenangan, penggunaan wewenang merupakan salah satu cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi dengan baik. Hal yang demikian apabila organisasi tersebut bersifat seragam atau yang disebut *intergrate type*
- b. Koordinasi melalui *consensus*, terbagi menjadi tiga macam yaitu: *consensus* melalui motivasi, *consensus* melalui timbal balik, dan *consensus* melalui ide.
- c. Koordinasi melalui pedoman kerja, pedoman kerja dijadikan landasan berpijak bagi setiap kegiatan, sehingga diharapkan dapat terselenggaranya koordinasi dengan cara yang sebaik-baiknya
- d. Koordinasi melalui forum, usaha-usaha koordinasi melalui forum ialah dengan menggunakan suatu wadah tertentu yang dapat dipergunakan sebagai cara mengadakan tukar menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam pemecahan suatu masalah dan pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama.
- e. Koordinasi melalui konferensi, diartikan dengan rapat atau sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan maupun pada tingkat pelaksanaan.

2.2.4. Ciri-ciri Koordinasi

Menurut Handyaningrat ciri-ciri koordinasi dalam (Nuwita, 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena telah melakukan koordinasi dengan baik.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*). Artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- e. Konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

2.2.5 Jenis koordinasi

Jenis-jenis koordinasi menurut Tosi dan Carroll (1982) dalam Asmu (2018) ada dua jenis koordinasi yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi vertikal yaitu menunjukkan pengembangan hubungan-hubungan yang efektif dan yang disatu padukan diantara kegiatan-kegiatan pada tingkat-tingkat organisasi yang berlainan. Contohnya persetujuan mengenai pengeluaran modal, katakana pada tingkat wakil direktur yang dikoordinasikan dengan penyerahan dan penerimaan perlengkapan modal pada tingkat pelaksanaan.
2. Koordinasi horizontal adalah pengembangan hubungan-hubungan yang lancar diantara individu-individu atau kelompok-kelompok pada tingkat yang sama. Jenis-jenis koordinasi menurut Handyaningrat (1991) bahwa ada dua jenis koordinasi yaitu: koordinasi intern dan koordinasi ekstern. Koordinasi intern terdiri atas: koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal

Sedangkan menurut Hasibuan (2011) ada dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kestauan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.
2. Koordinasi horizontal (*horizontal coordination*) pengkoordinasian tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi atau aparat yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi menjadi atas *interdisciplynary* dan *interrelated* yaitu:
 - a. *Interdisciplynary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan menyatukan tindakan-tindakan , mewujudkan dan menciptakan disiplin antar unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara esktern pada unit-unit yang sama

tugasnya

- b. *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) atau unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

2.2.6 Syarat-syarat koordinasi

Syarat- syarat koordinasi menurut Hasibuan (2011) diantaranya:

1. *Sense of cooperation* (perasaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat dari susut bagian perbagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang
2. *Rivalry*, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan
3. *Team spirit*, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai
4. *Esprit de corps*, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

Ringkasnya kekuatan suatu organisasi ditentukan *spirit-esprit* atau semangatnya. Semangat ini ditentukan oleh tujuan dan cara-cara mencapai itu dan ini meliputi doktrin.

Sedangkan menurut Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (2006), ada sembilan syarat mencapai koordinasi, yaitu:

- a. Hubungan langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung diantara orang-orang yang bertanggung jawab. Melalui

hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan, dapat dibicarakan dan salah paham dapat dijelaskan dan cara ini jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya.

b. Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai dengan mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Misalnya, sambil mempersiapkan rencana itu sendiri hanya ada dalam konsultasi bersama.

c. Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu, mulai dari tahapan perencanaan. Oleh karena itu koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung selama perusahaan berfungsi.

d. Dinamisme

Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi itu jangan kaku. Koordinasi akan meredakan masalah-masalah apabila timbul koordinasi yang baik akan mengetahui masalah secara dini dan mencegah kejadiannya.

e. Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam suatu perusahaan, manajer-manajer bagian harus diberi tahu tentang tujuan permasalahan dan diminta agar bekerja untuk tujuan bersama perusahaan.

f. Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Menurut Robbins struktur organisasi adalah pengakuan sebuah organisasi mengenai kebutuhan untuk membicarakan dan mengkoordinasikan pola-pola interaksi para anggotanya secara formal. Struktur organisasi bisa diisi oleh orang-orang yang berperan penting dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi memberikan gambaran pemisah kegiatan antara satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas

dan fungsi yang telah dibatasi.

g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab

Wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Wewenang yang jelas tidak harus mengurangi pertentangan diantara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan dengan kesatuan tujuan.

h. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Melalui saling tukar informasi secara terus menerus, perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, untuk waktu yang akan datang.

i. Kepemimpinan yang efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkatan perencanaan maupun pada tingkatan pelaksanaan

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa syarat koordinasi ini sangat penting untuk dapat tercapainya koordinasi yang baik, karena dengan adanya syarat tersebut dapat menjadi acuan bagi organisasi untuk mencapai pelaksanaan program dan tujuan yang ingin dicapai lewat koordinasi, seperti hubungan baik, tujuan yang jelas menjadi acuan untuk bisa menuju koordinasi organisasi yang baik.

2.2.7. Tujuan Koordinasi

Tujuan koordinasi menurut Ndraha (2015), yaitu:

- a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan,

antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.

- b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Sedangkan menurut Hasibuan (2011) tujuan koordinasi antara lain:

- a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan
- b. Untuk mnjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan
- c. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan
- d. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dan sasaran
- e. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan enam M ke arah sasaran organisasi atau perusahaan
- f. Untuk menghindari tindakan *overlapping* dari sasaran perusahaan

2.3 Tinjauan Stakeholder

2.3.1. Pengertian Stakeholder

Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah kelompok yang sangat luas dan beragam, ada yang mendukung dan bermanfaat, namun ada pula yang memberikan pengaruh negatif dan obstructif, dimana semua tergantung pada kebutuhan dan aspirasi yang berbeda-beda. Pemangku kepentingan tergantung pada jenis proyek, akan tetapi 50%-90% risiko dalam sebuah proyek atau program kegiatan terkait dengan para pemangku kepentingan. Menurut Freeman (1984) dalam (Astri, 2020) *stakeholder* adalah

kelompok atau individu apa saja yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Jones dalam Selviyanna (2012) *stakeholder* dapat diklafikasi ke dalam dua kategori yaitu:

- a. *Inside stakeholder*, terdiri dari pihak yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumberdaya perusahaan secara berbeda didalam organisasi perusahaan, seperti pemegang saham, para manager, dan karyawan.
- b. *Outside stakeholder*, terdiri dari orang-orang atau pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pola karyawan perusahaan tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti pelanggan, *costumers*, pemasok, pemerintah (*government*), masyarakat lokal, dan masyarakat secara umum (*general public*).

Berdasarkan pendapat ahli yang menyebutkan kategori *stakeholder* sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* dalam penelitian ini termasuk dalam ketegori *outside stakeholder*, karena *stakeholder-stakeholder* dalam menanggulangi banjir bandang terdiri dari orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersama dan dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan.

2.4 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi suatu kondisi atau peristiwa yang tidak diinginkan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks penanggulangan bencana, dimana penanggulangan merujuk pada berbagai fungsi upaya untuk mencegah, merespon, dan memulihkan. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang memberikan kesempatan kepada berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana termasuk lembaga internasional dan lembaga asing. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai elemen dan sektor dalam masyarakat untuk mencegah, mengurangi dampak, menanggapi, dan pulih dari bencana. Pentingnya penanggulangan bencana tidak dapat dilebih-lebihkan, mengingat dampak fisik ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan oleh bencana dapat sangat merusak dan menghancurkan.

Pencegahan dan mitigasi adalah dua aspek penting dari penanggulangan bencana. Pencegahan mencakup upaya untuk menghentikan bencana sebelum terjadi, melalui langkah-langkah seperti pengelolaan lingkungan yang baik, penegakan regulasi yang sesuai, dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Mitigasi di sisi lain adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana jika bencana tersebut tidak bisa dicegah. Ini bisa melibatkan aktivitas seperti penanaman hutan pelindung, perbaikan sistem *drainase*, dan pembangunan tanggul.

Pencegahan melibatkan langkah-langkah untuk menghindari terjadinya bencana, seperti pengendalian pembangunan di daerah rawan bencana. Sementara mitigasi berfokus pada pengurangan dampak bencana jika terjadi, seperti membangun infrastruktur yang tahan gempa atau membangun bendungan untuk mencegah banjir. Fase persiapan melibatkan pembuatan rencana dan prosedur yang akan digunakan saat bencana terjadi. Ini mungkin termasuk pelatihan tanggap darurat, simulasi bencana, dan penyusunan rencana evakuasi. Tujuannya adalah untuk memastikan

bahwa komunitas siap dan memiliki kapasitas untuk merespon bencana dengan efektif. Ketika bencana terjadi, fase respon menjadi krusial. Langkah-langkah dalam fase ini dapat mencakup pencarian dan penyelamatan, penanganan kebutuhan medis mendesak, serta penyediaan makanan, air, dan tempat berlindung. Koordinasi yang efektif antara berbagai agen dan organisasi, baik lokal maupun internasional, sangat penting di sini setelah bencana, fase pemulihan dimulai. Tujuannya adalah untuk memulihkan komunitas dan mengembalikannya ke kondisi normal atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ini bisa melibatkan pembangunan kembali infrastruktur, penyediaan dukungan psikologis untuk korban, dan upaya untuk memulihkan ekonomi lokal. Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Melalui kerjasama dan kolaborasi, kita dapat membangun komunitas dan masyarakat yang lebih tahan terhadap bencana dan mampu pulih dari dampaknya. Dengan demikian, penanggulangan bencana adalah kunci utama untuk ketahanan dan keberlanjutan kita di masa depan. Undang- Undang Tahun 2007 pasal 1 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
2. Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit
3. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau tujuh serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Pasal 33 dalam pelaksanaan upaya menanggulangi bencana banjir, maka

penanganan dan penanggulangan bencana meliputi tiga tahap yaitu:

1. Pra bencana, kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi kerugian harta dan korban manusia yang disebabkan oleh bahaya dan memastikan bahwa kerugian yang ada juga minimal ketika terjadi bencana. Situasi tidak terjadi bencana, yaitu:
 - a. Pengurangan resiko bencana, dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana
 - b. Perencanaan penanggulangan bencana, dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana
 - c. Pencegahan, kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana
 - d. Pendidikan dan pelatihan, masyarakat dan anggota penanggulangan bencana dalam menghadapi bencana untuk mengurangi jatuhnya banyakkorban akibat bencana, maka dalam kegiatannya dibutuhkan pendidikan dan pelatihan kebencanaan, bimtek mitigasi bencana, termasuk melakukan pelatihan dalam menghadapi bencana bagi masyarakat yang berada dalam wilayah yang rawan bencana. Situasi terdapat potensi bencana, yaitu:
 - a) Mitigasi, serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan peringatan dini, upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi agar terhindar dari ancaman atau resiko bencana banjir.
 - b) Kesiapsiagaan, kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

2. Saat bencana, kegiatan yang dilaksanakan pada saat kejadian bencana yang bertujuan untuk menangani dampak yang ditimbulkan, kegiatan yang dilakukan ialah:
 - a. Penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Perlindungan
 - d. Pengurusan pengungsi
 - e. Penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
3. Pasca bencana, penanggulangan pasca bencana adalah tindakan utama yang harus dilakukan ada dua yaitu:
 - a. Rehabilitasi pembukaan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
 - b. Rekonstruksi pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

2.5 Banjir

Bencana banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan hilangnya nyawa serta harta benda. Kerugian banjir dapat berupa kerusakan pada bangunan, kehilangan barang-barang berharga. Banjir tidak dapat dicegah tetapi bisa dikontrol dan dikurangi dampak kerugiannya (Aprilia, 2015). Bencana banjir tidak hanya terjadi di perkotaan, daerah pedesaan yang memiliki wilayah resapan air yang luas

pun dapat mengalaminya. Tentunya banjir di perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda dan menimbulkan dampak kerugian yang berbeda pula. Peristiwa banjir seakan sudah menjadi agenda tahunan yang datang ketika musim hujan tiba. Sedangkan banjir di daerah pedesaan umumnya disebabkan oleh gundulnya hutan sehingga debit air TAS sungai meluap dan membuat banjir bandang disekitaran desa.

Bencana banjir biasanya terjadi pada musim hujan dan sering kali menimbulkan dampak yang signifikan, seperti kerusakan infrastruktur, perpindahan penduduk, dan kadang-kadang korban jiwa. Beberapa daerah yang sering terkena banjir di Indonesia antara lain Jakarta, Bandung, Semarang, dan banyak daerah lainnya. Banjir bisa memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek termasuk kerusakan fisik pada bangunan dan infrastruktur, perpindahan penduduk, dan potensi korban jiwa. Sementara dampak jangka panjangnya bisa berupa kerusakan lingkungan, seperti erosi tanah dan kerusakan habitat, serta masalah kesehatan masyarakat, seperti penyebaran penyakit yang berhubungan dengan air (Sumiati et al., 2024)

Menurut Erlangga dalam (Lestari et al., 2016) banjir adalah genangan air yang mengalir deras dengan ketinggian melebihi tingkat normal. Pada saat banjir, air akan menggenangi sebagian besar daratan yang biasanya tidak tergenangi air. Ketika musim hujan tiba sebagian daerah mengalami banjir. Curah hujan yang tinggi membuat beberapa daerah tergenang air. Banjir yang sangat berbahaya adalah banjir bandang yang besar dengan datangnya air secara tiba-tiba dan bersifat menghanyutkan. Kategori atau jenis banjir terbagi berdasarkan lokasi sumber aliran permukaan dan berdasarkan mekanisme terjadinya banjir (Anggrayni et al., 2021)

1. Berdasarkan lokasi sumber aliran permukaannya:

Banjir kiriman (banjir bandang), banjir yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan di daerah hulu sungai. Banjir yang terjadi di daerah yang permukaannya rendah dan disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang tinggi. Bencana ini terjadi karena keadaan air

pada daerah yang terkena banjir sudah tidak dapat diserap oleh lapisan tanah. Bencana ini juga tergolong bencana besar yang dapat meningkatkan kerugian pada suatu daerah.

- a) Banjir lokal, banjir yang terjadi karena volume hujan setempat yang melebihi kapasitas pembuangan disuatu wilayah. Penyebab terjadinya banjir lokal yaitu tingginya insesnsitas hujan dan belum adanya saluran *drainase* yang baik sesuai dengan sebaran luas hujan lokal.

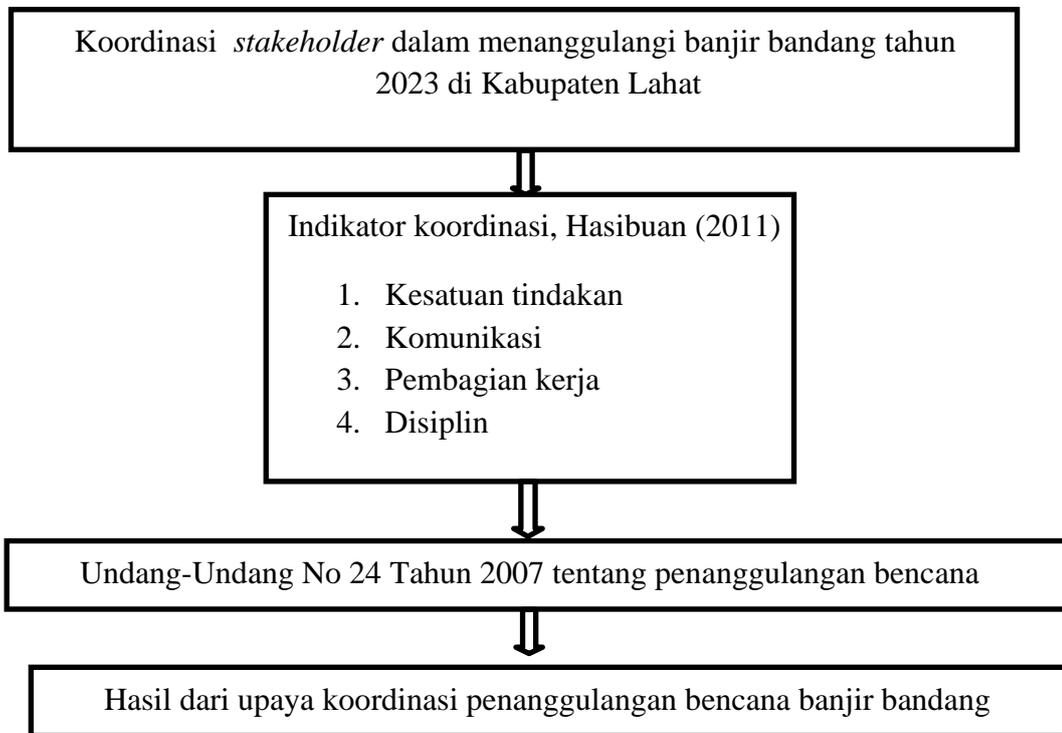
2. Berdasarkan mekanisme banjir terdiri tas dua jenis yaitu:

- a) *Regular flood*, banjir yang diakibatkan oleh hujan
- b) *Irreguler flood*, banjir yang diakibatkan oleh selain hujan, seperti tsunami, gelombang pasang dan hancurnya bendungan.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari koordinasi *stakeholder* dalam menanggulangi bencana banjir dalam penelitian ini buat kerangka berpikir. Sehingga dengan adanya kerangka berfikir ini, baik peneliti maupun pembaca mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penenelitian. Menurut Sugiyono dalam (Musyadad et al., 2015) mendefinisikan kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut ini kerangka teoritis yang penulis susun:

Gambar 2. 1. Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2011), fokus penelitian dimaksudkan untuk memberi batasan sebuah studi yang mana peneliti tidak perlu ke sana kemari untuk mencari subjek penelitiannya, sudah secara otomatis dibatasi dengan fokusnya. Dalam suatu organisasi, setiap pimpinan harus mengkoordinasikan kegiatan anggota organisasi yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugas. Ketika memberikan informasi yang jelas, komunikasi dan pembagian kerja kepada bawahannya, maka setiap bawahan akan bekerja sesuai dengan wewenang yang diberikan. Menurut Hasibuan (2011), koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan para anggota dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi Hasibuan lebih mengarah pada suatu proses penyatuan sasaran dan kegiatan unit-unit yang terpisah dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Fokus dalam penelitian yaitu meneliti tentang koordinasi *stakeholder* dalam menanggulangi banjir bandang di Kabupaten Lahat, Hasibuan (2011) berpendapat bahwa indikator koordinasi sebagai berikut:

1. Kesatuan tindakan, mengetahui bentuk koordinasi *stakeholder* dalam menanggulangi bencana banjir, mekanisme dan prosedur yang memastikan kesatuan diantara anggota tim, *stakeholder* melakukan koordinasi dan berkolaborasi bersama untuk mencapai kesatuan tindakan dalam

- menghadapi bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat
2. Komunikasi, peneliti ini melihat bagaimana komunikasi dan informasi yang terjalin antar *stakeholder* dalam menanggulangi bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat
 3. Pembagian kerja, yaitu mengetahui ketepatan tugas dan tanggung jawab antar *stakeholder* dalam menanggulangi banjir bandang di Kabupaten Lahat
 4. Disiplin, memastikan apakah *stakeholder* dalam penanggulangan menaati aturan dan prosedur yang ditetapkan dan sudah melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dalam menanggulangi bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja.

Penelitian ini dilakukan pada instansi yang terkait dalam koordinasi *stakeholder* dalam menanggulangi banjir bandang tahun 2023 yaitu di Kabupaten Lahat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Markas Palang Merah Indonesia, Linmas Satuan Polisi Pamong Praja. Lokasi ini dipilih didasarkan pada alasan Kabupaten Lahat merupakan salah satu Kabupaten yang rawan bencana, terutama banjir bandang yang hampir setiap tahun hal ini sangat menarik untuk diteliti karena dapat melihat bagaimana koordinasi *stakeholder* dalam menangani bencana tersebut.

3.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen dalam Anam (2014) pendekatan kualitatif memiliki lima karakteristik yaitu sumber data langsung dalam situasi wajar, mengutamakan proses dari pada produk atau hasil, analisis data secara deskriptif dan mengutamakan proses dari pada produk atau hasil, analisis data secara deskriptif dan mengutamakan makna. Pendekatan ini dipilih karena peneliti dapat memecahkan masalah dengan merumuskan dan menganalisis lebih dalam sebuah gejala atau keadaan yang dijadikan penelitian berdasarkan fakta sehingga peneliti dapat mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumen

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data merupakan tipe-tipe data yang diperoleh sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, data yang secara langsung di dapatkan di lokasi penelitian dan bersumber dari informan melalui wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Linmas Satuan Polisi Pamong Praja, Markas Palang Merah Indonesia, relawan, swasta dan salah satu masyarakat yang terkena banjir bandang di Kabupaten Lahat.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh

peneliti. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini jurnal, buku, rekapitulasi banjir, Surat Keputusan dan Renstra BPBD Tahun 2019-2023

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan informasi dari informan yang terkait. Informan adalah orang yang dijadikan sebagai sumber informasi dan bersedia memberikan tentang suatu permasalahan. Peneliti memilih informan sesuai dengan bidang yang menguasai masalah penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1 Informan

No	Informan	Jabatan	Tanggal Wawancara
1.	Peri , ST.MT	Kabid Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kabupaten Lahat	20 Maret 2024
2.	Erwan Ekajaya,ST,MT	Kabid Rehabilitas dan Kontruksi, BPBD Kabupaten Lahat	18 Maret 2024
3.	Deby Anggraeny, ST,MT	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Kabupaten Lahat	21 Maret 2024
4.	Dian Zulkifki, S.E	Kepala Seksi Logistik dan Peralatan, BPBD Kabupaten Lahat	15 Maret 2024
5	Merisa .	Masyarakat Desa Pasar Bawah Kabupaten Lahat	17 Maret 2023
6	Henny Tariza, S.Kep.Ners. .	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan jaminan Kesehatan, Dinas Kesehatan	19 September2024
7.	Saipul Antoni, SE	Kepala bidang Pranata Bencana Dinas Sosial	9 September2024
8.	Hendra Kurniawan,S.E	Kasi Monitoring dan pelaporan, di Satuan Pamong Praja Kabupaten Lahat	11 September 2024
9.	Widi Apriansi,SE,MM	Kabid Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum	13 September 2024
10.	Reza	Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Lahat	10 September 2024
11.	Naris Afandi, S.E	Pj Kades Desa Lubuk Sepang	20 Januari 2025
12.	Hafis Alfarezi	Karang Taruna Desa Lubuk Sepang	20 Januari 2025

13.	Letkol Inf Asis Kamaruddin, SE., MIP.	Komandan Distrik Militer Kabupaten Lahat	20 Januari 2025
14.	Iptu Amrin Prabu	Kapolsek Pulau Pinang	20 Januari 2025

Sumber: Diolah oleh peneliti 2024

2. Dokumentasi merupakan catatan penting yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Tabel 3.2 Dokumentasi

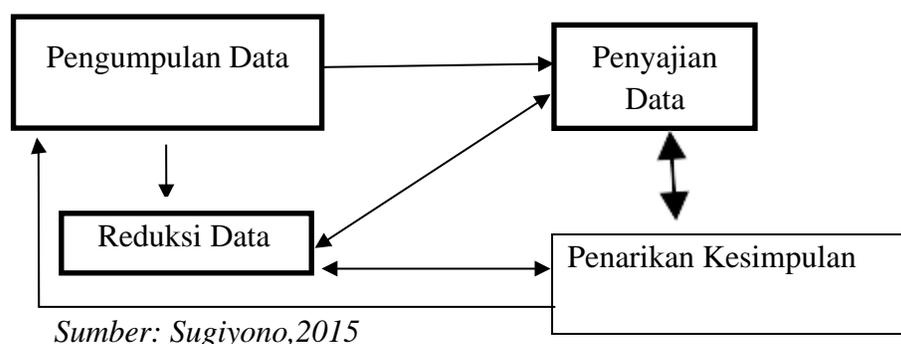
No	Dokumentasi	Sumber
1.	SK Bupati Nomor: 013/SK/BPBD/2023	BPBD Kabupaten Lahat
2.	SK Bupati Nomor: 013/53a/KEP/BPBD/2023	BPBD Kabupaten Lahat
3.	Profil bencana kejadian Kabupaten Lahat 2021	BPBD Kabupaten Lahat
4.	Buku dan Jurnal	Internet
5	Foto-foto Kejadian .	Dinsos, SatPOLPP, BPBD

Sumber: Diolah oleh peneliti

3.5 Tehnik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis data tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut:

Gambar 3 1. Analisis Data Model Miles dan Huberman



1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Sugiyono (2015) mengatakan bahwa pengumpulan data adalah data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai, sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya, dan guna mendapatkan catatan ini, maka peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap beberapa responden penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang didapat merupakan data valid.

2. Reduksi Data

Tahap kedua peneliti memilih data yang didapat dan disusun secara urut dan tertata rapih. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan informasi dan data/dokumen dari berbagai sumber yang berhubungan dengan koordinasi *stakeholder* dalam menanggulangi banjir bandang di Kabupaten Lahat, namun tidak semua informasi digunakan sebagai sumber data penelitian, maka pada tahap ini peneliti mereduksi data dan informasi yang hanya berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah peneliti mendapatkan informasi yang di dapat dari lapangan dimasukan ke dalam suatu matriks, kemudian data tersebut disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami lalu dibandingkan dengan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah penyajian data tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan penganalisaan data dan mendeskripsikan data tersebut sehingga data dapat di mengerti dan jelas sesuai tujuan penelitian yaitu mengetahui isi dan makna dari permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan tindakan kesatuan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin dari hasil koordinasi *stakeholder* dalam menanggulangi banjir bandang di Kabupaten Lahat.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji objektivitas (*confirmability*).

1. Uji kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan peningkatan ketekunan dalam penelitian dan triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *memberchek* (Sugiyono, 2015).

- a. Ketekunan peneliti diperlukan dalam pengamatan dan memeriksa informasi dan data yang didapatkan peneliti secara lebih cermat dan berkesinambungan. Melalui peningkatan ketekunan, peneliti melakukan pengecekan berulang apakah data sudah benar atau tidak terhadap koordinasi *stakeholder* dalam menanggulangi banjir bandang di Kabupaten Lahat. Sehingga peneliti bisa mendeskripsikan data secara lebih akurat dan sistematis mengenai apa yang diamati secara penelitian berlangsung. Penelitian ini juga ditunjang dengan berbagai referensi seperti buku, jurnal dan dokumen dan foto yang berhubungan dengan temuan peneliti.
- b. Triangulasi adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini peneliti membandingkan apa yang dilakukan (responden), dengan

keterangan wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap konsisten di tunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini

2. Uji transferabilitas (*transferability*)

Uji transferabilitas adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil (Sugiyono 2015). Peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian koordinasi *stakeholder* dalam menanggulangi banjir bandang di Kabupaten Lahat.

3. Uji dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini melakukan audit dengan cara berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Peneliti berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian .

4. Uji konfirmabilitas/objektivitas (*confirmability*)

Uji konfirmabilitas merupakan uji objektivitas di dalam penelitian kuantitatif,. Penelitian ini bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Penelitian kualitatif uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang ditelaah, apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Pada tahap ini peneliti menjelaskan proses awal hingga akhir penelitian menangani koordinasi *stakeholder* dalam menanggulangi banjir bandang di Kabupaten Lahat

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi banjir bandang di Kabupaten Lahat peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa koordinasi *stakeholder* dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat belum berjalan dengan maksimal, berikut ini dijelaskan:

1. Pada konteks kesatuan tindakan, dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Lahat koordinasi antara BPBD dengan *stakeholder* sudah berjalan yaitu sudah adanya kerja sama yang dilakukan dalam penanggulangan banjir bandang.
2. Pada konteks komunikasi, antara *stakeholder* dalam pelaksanaan koordinasi komunikasi sudah berjalan akan tetapi masih kurang optimal dikarenakan jumlah pertemuan untuk melakukan komunikasi juga masih kurang dan tidak adanya target jumlah pertemuan koordinasi tersebut. Dalam komunikasi yang dilakukan hanya sebatas pimpinan sebagai upaya mengingatkan dan memberikan informasi terkait perkembangan masing-masing program kegiatan. Pemberitahuan informasi masih kurang dilakukan sehingga komunikasi yang terjalin kurang intensif dan masih kurangnya media *partner*.
3. Pada konteks pembagian kerja, adapun BPBD sebagai *leading sector*

dalam bencana banjir adalah melakukan evakuasi dan pendataan pemetaan terhadap daerah yang berdampak banjir bersama *stakeholder*. Pada tahap pembagian kerja sudah berjalan dengan adanya Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Pos Komando

4. Disiplin, pada konteks disiplin yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dengan *stakeholder* dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lahat sudah optimal dan instansi tersebut sudah menerapkan kedisiplinan di setiap instansi mereka masing-masing.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan bagi *stakeholder* agar koordinasi pelaksanaan penanggulangan banjir yang dilakukan lebih efektif:

1. Koordinasi *stakeholder* Kabupaten Lahat dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lahat ditahun selanjutnya diharapkan dapat berjalan dengan lebih maksimal. Begitu juga koordinasi BPBD dengan instansi lainnya diharapkan berjalan lebih baik lagi dengan meningkatkan komunikasi dan juga kapasitas SDM pada setiap instansi terkait koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir melalui pelatihan khusus.
2. Dikarenakan dalam koordinasi yang terjalin antara BPBD dengan dengan instansi lain tidak memiliki jadwal khusus dalam pertemuan rapat kerja, maka ada baiknya dibuatkan jadwal khususnya ketika sebelum dan sesudah terjadi bencana agar dapat menjadi pembelajaran apabila bencana datang lagi, apabila dilakukan pertemuan atau briefing diharapkan pegawai yang dikirim ke pertemuan tersebut adalah pegawai yang mengerti masalah kebencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. 2013. Karakterisasi Bencana Banjir Bandang di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, 15(1) : 42-51.
- Aghnesya, A., Esli,D., Takumansang., Amanda. 2021.. Analisis Tingkat Kerawanan Banjir di Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongodow. *Jurnal Spasial*. 8(3).
- Aji YK Putra, T. M. V. A. 2023. *Update Banjir Bandang di Lahat, 28 Rumah Hanyut dan 19 Rusak Berat*. Kompas.Com.
<https://regional.kompas.com/read/2023/03/10/105423978/update-banjir-bandang-di-lahat-28-rumah-hanyut-dan-19-rusak-berat?page=all>
- Aprilia, A., Bengkulu, A. K., & Bengkulu, P. (n.d.). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Dikota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
- Arief Imawa, S. (2023). *BPBD SUMSEL MELAKUKAN KAJI CEPAT KE LOKASI KEJADIAN BENCANA BANJIR BANDANG DI KOTA LAHAT, SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN MENYERAHKAN BANTUAN GUBERNUR SUMSEL*. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. <http://bpbd.sumselprov.go.id/bpbd-sumsel-melakukan-kaji-cepat-ke-lokasi-kejadian-bencana-banjir-bandang-di-kota-lahat-serta-memberikan-pelayanan-kesehatan-dan-menyerahkan-bantuan-gubernur-sumsel>.
- Ariyanto, D. 2018. Koordinasi Kelembagaan dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Pennggulan Bencana Daerah. *Journal of management Riview* 2(1) :161- 171.
- Arsyad. 2017. Modul Kelembagaan dan Kordinasi Penanggulangan Bencana dan Pelatihan penanggulangan Bencana Banjir. Bandung.

- Asmu, H., Haris, I., & Lamatenggo, N. 2018. Keefektifan koordinasi kepala sekolah dalam mengintegrasikan program dan kegiatan di SMA Negeri 1 Manangu Kabupaten Boalemo. *Jurnal Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, 3(1), 87-94
- Astuti,R.,Hutagalung,S.S.,Antika, B.D. 2022. Optimalisasi Kinerja BPBD dalam Diseminasi Informasi Mitigasi Bencana Tsunami di Kecamatan Kotaagung Kabuapten Tanggamus. *Jurnal Birokrasi ,kebijakan dan Pelayanan Publik*. 4(2): 195-206.
- Audina,N., Rachmawati dan Purwanti. 2019. Koordinasi Antar Lembaga Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi.PAPATUNG: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintah dan Politik*. 2(2),28-38.
- B, A., & Fatahilah, A. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Registratie*, 1(1), 61–78. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v1i1.835>
- Bakti,A,V.,& Fadhlurahman. 2020. Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Puwerejo. *Jurnal Masalah-masalah Sosial*. 11(2).
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabuapten Lahat, 2019. *Rencana Starategi Badan Penanggulangan Bencana kabupaten Lahat 2019-2024*. Lahat: Badan Penangglangan Bencana
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat. 2023. *Staistika Daerah Kabupaten Lahat 2023*. Lahat: Badan Pusat Statistika
- Citra, A., Mahsyar, A., & Parawangi, A. 2020. Koordinasi Antar SKPD Dalam Menanggulangi Pedagang Kaki Lima Yang Mengganggu Lalu Lintas Di KotaMakassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(1), 11–19.
- Dwijayanti, P. 2013. *BPDD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA Abstrak. 1*.
- Deswimar, D. 2018. Pengaruh Koordinasi Vertikal Dan Horizontal Terhadap

Efektifitas Kerja Pegawai Uin Suska Riau. *Jurnal EL-RIYASAH*, 8(2), 67. <https://doi.org/10.24014/jel.v8i2.4410>

Elsera, C. 2023. Peran Koordinasi Pimpinan Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-E) Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(02), 334–347.

Fidayani, A. 2015. Kesiapgiaagn Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir di KotaSemarang. *Jurnal Geografi*. 12(1): 103-114.

Fitrah, M. & Luthfiyah. 2017. Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Sukabumi: CV Jejak.

Handyaningrat, S.1982. ADMINISTRASI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL. Jakarta : PT Gunung Agung

Hasibuan, M.S.P. 2011. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: BumiAksara.

Ikrom, Z., Rachmadiani, O. T., Hudha, N., Gunawan, A. A., & Shabrina, A. 2023. Koordinasi Media Sebagai Stakeholder Dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob Pantura Melalui Saluran Komunikasi. : *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 2(10), 2023–2024.

Iqbal, M. (2020). Koordinasi Kepolisian Dan Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Nunukan. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 370–784.

Jatilaksono, Raditya. 2016. PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN CV. ABANK IRENK CREATIVE YOGYAKARTA. S1 thesis, Fakultas Ekonomi

Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Banjir-Bandang di LAHAT, SUMATERA-SELATAN, 09-01-2020*. Pusat Krisis Kesehatan. <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir-Bandang-di-LAHAT-SUMATERA-SELATAN-09-01-2020-83>

Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. *Banjir di LAHAT, SUMATERA-SELATAN, 12-10-2021*. Pusat Krisis Kesehatan.

<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir-di-LAHAT-SUMATERA-SELATAN-12-10-2021-59>

- Limanik, N. R., & Mubarak, A. 2021. Koordinasi Stakeholder Dalam Pengawasan Kapal Wisata Di Kota Pariaman. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 885–892. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2352>
- Manoppo, I. R. A., Mantiri, M., & Sambiran, S. 2017. Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–10.
- Monica,C., Hazzah, S. 2022. Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam Upaya Penanggulangan Pasca Bencana Banjir di Kota Medan . *jurnal Professional*, 9(2), 327-334. <https://doi.org/10.37676/professional.v9i2.3237>.
- Moekijat. (1994). KOORDINASI (Suatu Tinjauan Teoritis). Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Nuwita, M. S. 2021. Koordinasi Antar Stakholder dalam Pengembangan Ekowisata Desa Sungai Langkah Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.*Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(3), 267–280. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i3.99>
- Septi Dwi Wulandari, & Rahmat Salam. (2022). Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tangerang Selatan. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 534–548. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2760>
- Sumiati, I., & Arifin, R. K. 2024. Koordinasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kota Cimahi.*ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 132–140. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i2.1208>
- Sidik & Denok. 2021. Metode Penelitian Kuantitatif. Tangerang:Pascal Books
- Sugihartatmo. 2015. Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial. Universitas Pasudan. Jakarta.

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taliziduhu Ndraha. 2015. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thamrin, G. 2021. Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Tahun 2021 di Kabupaten Majene.
- Tololiu, W. R., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2022). Koordinasi Pemanfaatan Dana di Desa Kayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(122), 48–55.
- Ramdani, Mustika Endah. Koordinasi Oleh Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Media Pengembangan Dan Praktk Administarsi*. 11(3).383 – 406.
- Pradipta, G., Santoso, A. Y., Saipullah, & Fahri Syarief. (2023). Stakeholder Collaboration in Flood Disaster Management in Labansari Village. *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)*, 2(1), 27–36. <https://doi.org/10.55381/ijsrr.v2i1.164>
- Pujianti, P., & Gerry Katon, M. (2023). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 5(2), 171–185. <https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1457>
- Westra, Patriata. 1989. *Ensiklopedi Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung